

# KINERJA BPOM

## DALAM ANGKA

### TRIWULAN II TAHUN 2021





**BADAN POM**

**KINERJA BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2021

# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga tahun 2021 pandemi COVID 19 masih melanda dunia. Hal tersebut benar - benar mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 81.320 NIE, pemeriksaan di 11.606 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 34.452 sampel, 144 perkara, dan 18 kegiatan pelaksanaan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 16 September 2021  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>HIGHLIGHT</b> .....	1
<b>HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b> .....	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan .....	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan .....	10
III. Standardisasi .....	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan .....	12
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan .....	12
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat .....	14
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik .....	20
VIII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	21
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	22
X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	23
XI. Kerjasama Internasional .....	25
XII. Sumber Daya Manusia .....	27
XIII. Pengadaan Barang Jasa .....	29
XIV. Pengelolaan Anggaran .....	29
XV. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM .....	30
<b>PENUTUP</b> .....	30
<b>LAMPIRAN</b> .....	31

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Profil Registrasi Obat dan Makanan .....	5
<b>Gambar 2.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan .....	5
<b>Gambar 3.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan .....	6
<b>Gambar 4.</b>	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
<b>Gambar 5.</b>	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) .....	7
<b>Gambar 6.</b>	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) .....	7
<b>Gambar 7.</b>	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
<b>Gambar 8.</b>	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan .....	8
<b>Gambar 9.</b>	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	9
<b>Gambar 10.</b>	Profil Profil Laporan Efek Samping .....	9
<b>Gambar 11.</b>	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari –Juni 2021)..	10
<b>Gambar 12.</b>	Grafik Baku Pembanding yang dimanfaatkan (Januari – Juni 2021).....	13
<b>Gambar 13.</b>	Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu .....	13
<b>Gambar 14.</b>	Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar.....	13
<b>Gambar 15.</b>	Grafik Pengujian Spesimen Covid 19 .....	14
<b>Gambar 16.</b>	Grafik Penerbitan Siaran Pers.....	14
<b>Gambar 17.</b>	Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media.....	14
<b>Gambar 18.</b>	Grafik Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM .....	14
<b>Gambar 19.</b>	Profil Engagement Media Sosial Badan POM .....	13
<b>Gambar 16.</b>	Top Engagement Content pada Platform <i>Facebook</i> Triwulan I Tahun 2021 .....	14
<b>Gambar 17.</b>	Top Engagement Content pada Platform <i>Twitter</i> Triwulan I Tahun 2021 .....	14
<b>Gambar 18.</b>	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan I Tahun 2021 .....	14
<b>Gambar 19.</b>	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I Tahun 2021 .....	15
<b>Gambar 20.</b>	Top engagement content Badan POM pada platform <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> , <i>Instagram</i> dan <i>Youtube</i> .....	16
<b>Gambar 21.</b>	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM.....	16
<b>Gambar 22.</b>	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media.....	17
<b>Gambar 23.</b>	Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Profesi.....	18
<b>Gambar 24.</b>	Profil Media Komunikasi yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Layanan Informasi.....	18
<b>Gambar 25.</b>	Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensifikasi COVID-19 .....	20
<b>Gambar 26.</b>	Tampilan Baru Aplikasi <i>Contact Center</i> .....	20
<b>Gambar 27.</b>	Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM.....	27
<b>Gambar 28.</b>	Grafik Akses dan data informasi yang ada pada Aplikasi <i>SIMPONI</i> .....	28



**BADAN POM**

# **HIGHLIGHT**

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2021

# Kawal Vaksin Merah Putih Demi Kemandirian Produksi Dalam Negeri

Jakarta / Selasa (13/04/2021)



Sebagai regulator di bidang obat, Badan POM mempunyai tugas melakukan pengawalan pengembangan vaksin produksi dalam negeri. Salah satunya Vaksin Merah Putih. Sebagai salah satu wujud dukungannya tersebut, Badan POM menggelar “*Workshop Pengawalan Vaksin Merah Putih*” dengan tema Asistensi Regulatori pada Tahap Awal Pengembangan Vaksin untuk Memperoleh *Target Product Profile*.

Pengembangan vaksin COVID-19 menjadi salah satu inisiatif yang sedang dilakukan oleh beberapa Lembaga Perguruan Tinggi dan Penelitian di Indonesia. Pengembangan tersebut dikoordinir oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) / Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bawah Konsorsium Vaksin Merah Putih. Pengembangan Vaksin Merah Putih ini merupakan respon terhadap kebutuhan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Juga sebagai upaya menuju kemandirian bangsa dalam penyediaan vaksin agar tidak tergantung kepada produk vaksin dari luar negeri.

## Transformasi Digital Permudah Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan memiliki banyak data strategis terkait obat dan makanan yang tersebar di seluruh unit kerja. Data-data tersebut tidak hanya terkumpul, melainkan dapat dianalisa menjadi informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan menjadi output kebijakan. Untuk membahasnya, Badan POM menggelar Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tema “*Cyber Security dalam Mendukung Digital Transformation*”.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyambut baik transformasi digital di Badan POM untuk mempermudah kinerja pengawasan obat dan makanan. Terutama di masa pandemi COVID-19, sistem kerja dapat dilakukan di mana saja, sehingga adanya transformasi digital ini menjadi efektif dan efisien. “Transformasi digital tidak hanya pada aspek teknologi, melainkan juga pada budaya dan *mindset* sumber daya manusianya,” jelasnya.

Bandung / Senin (26/04/2021)



## Tingkatkan Kemampuan Pengujian Obat dan Makanan, Badan POM Gelar Sosialisasi Desain Regionalisasi Laboratorium

Denpasar / Rabu (19/05/2021)



Badan POM menggelar Sosialisasi Desain Regionalisasi Laboratorium secara daring dan luring di Bali. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam arahannya menjelaskan, regionalisasi laboratorium bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian untuk mewujudkan pengujian yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

Konsep regionalisasi laboratorium perlu diuji coba dalam suatu *pilot project* untuk mengetahui tantangan yang perlu diantisipasi serta aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sebagai bagian dari penyempurnaan Desain Regionalisasi Laboratorium. Keberhasilan regionalisasi laboratorium hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama antara Pusat dan UPT Badan POM di daerah.

## Badan POM Ajak Masyarakat Bijak Membeli Obat Tradisional Online di Masa Pandemi

Peminat obat tradisional dalam memelihara daya tahan tubuh semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan *demand* obat tradisional yang semakin menanjak harus disertai dengan penggunaan secara bijak oleh masyarakat dalam memilih produk yang dipromosikan dan diedarkan, terutama melalui penjualan *Online*. Menyikapi hal ini, Badan POM senantiasa melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat agar terhindar dari kesalahan penggunaan produk obat tradisional. Salah satunya melalui webinar Bincang-Bincang Seputar Penggunaan Obat Tradisional Aman Selama Masa Pandemi yang mengangkat tema “Bijak Menggunakan Obat Tradisional yang Diedarkan Secara *Online* pada Masa Pandemi”.

Jakarta / Kamis (27/05/2021)



## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kunci Percepatan Akses Obat Selama Pandemi

Jakarta / Selasa (21 - 25/06/2021)



Mengambil momentum *World Public Service Day* yang jatuh pada tanggal 23 Juni setiap tahunnya, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Forum Pelayanan Publik Terpadu di Bidang Obat Sepanjang Produk *Life Cycle*. Mengambil tema “Sinergisme dengan Semangat Melayani Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19”.

“Berbagai tuntutan percepatan pelayanan publik mengharuskan kita mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini dianggap kaku, prosedural, dan administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan kepada kecepatan, inovatif, dan berorientasi kepada tujuan yang komprehensif,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat membuka acara tersebut secara langsung.

## Hari Keamanan Pangan Sedunia, Angkat Rempah Indonesia Mendunia

Pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini, Badan POM mengambil peran untuk lebih mengangkat rempah dan bumbu Indonesia mendunia. Kegiatan puncak peringatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan *talkshow* bertema “Badan POM Mendukung *Spice Up The World* Mendorong *UMKM Go Export*”. Dukungan penuh Badan POM pada program “*Spice Up the World*” ditujukan kepada para pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

*Spice Up the World* adalah program mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia yang mencakup produk bumbu dan rempah Indonesia untuk masuk ke pasar mancanegara. Badan POM mendukung program ini dengan melakukan pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada para pelaku usaha. Terkait dengan kegiatan ekspor, Badan POM melakukan percepatan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) *online* melalui [e-bpom.pom.go.id](http://e-bpom.pom.go.id) dengan penerapan tanda tangan elektronik.

Jakarta / Selasa (22/06/2021)





**BADAN POM**

# **HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

s.d. TRIWULAN II TAHUN 2021

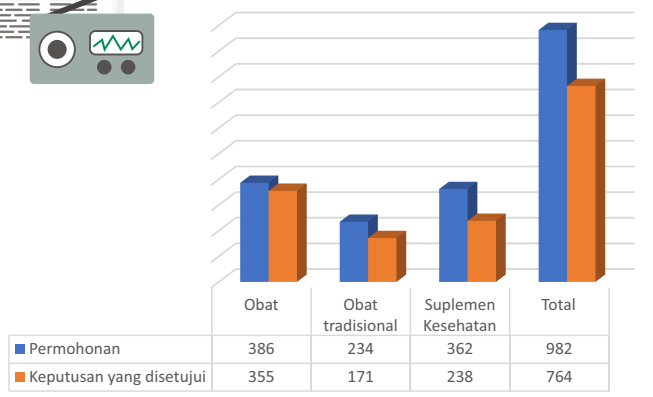
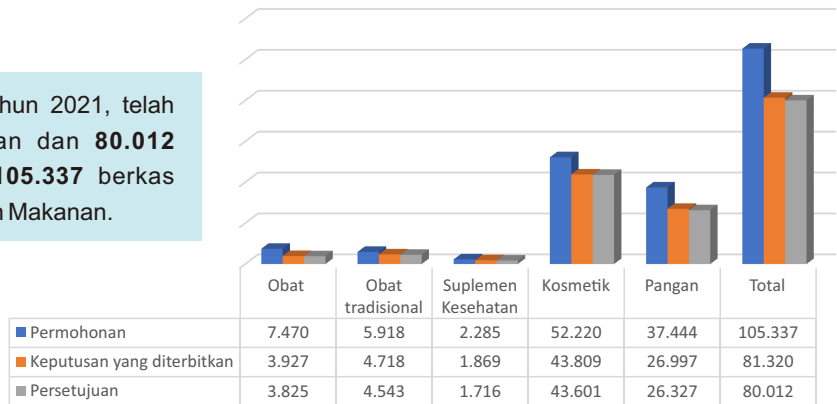
# I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

## Pengawasan *pre-market*

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, telah diterbitkan **81.320** keputusan dan **80.012** persetujuan izin edar dari **105.337** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, dari 982 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 764 (77,80%) iklan.**

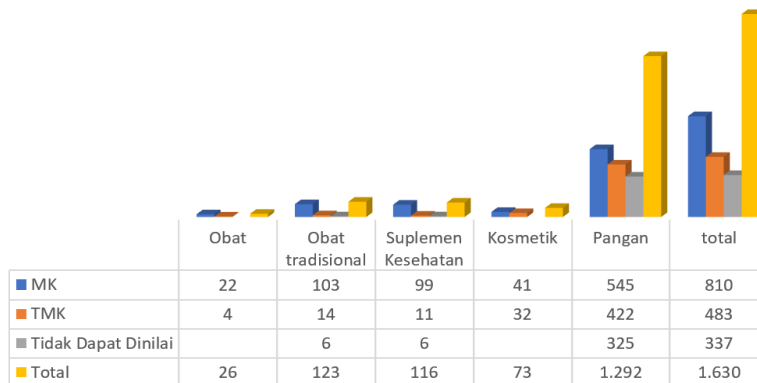
# Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

## 1

## Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan

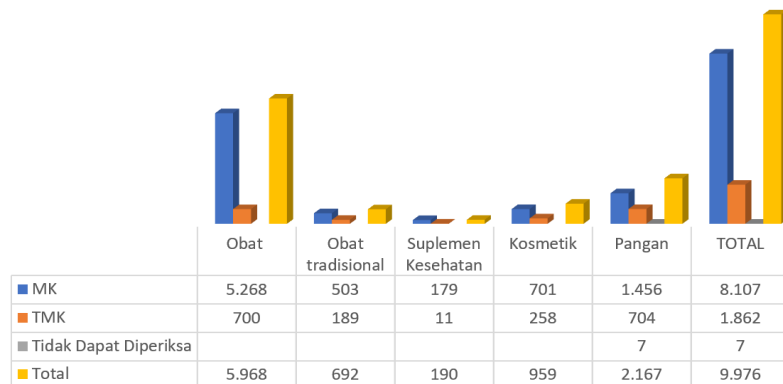


Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 telah diperiksa sebanyak **1.630 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **483 (29,63%) sarana adalah TMK.**

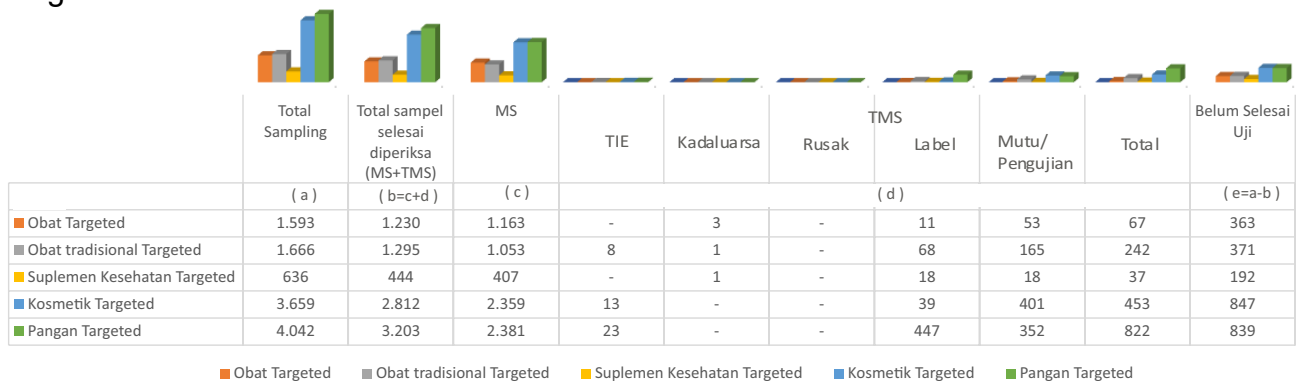
Keterangan:  
MK = Memenuhi Ketentuan  
TMK = Tidak Memenuhi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 telah diperiksa **9.976 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **1.862 (18,66%) sarana adalah TMK.**



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

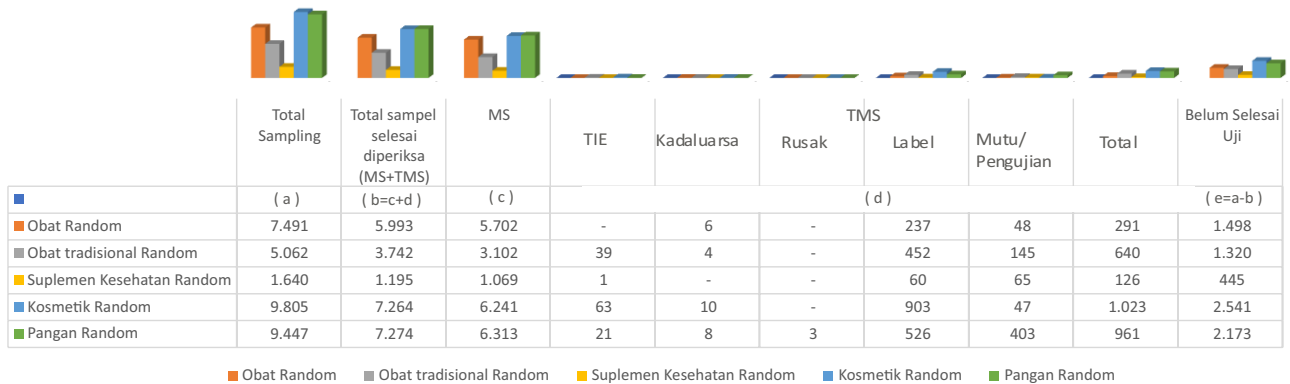
A. Targeted



Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan **Triwulan II tahun 2021**, dari **11.596 sampel targeted** yang disampling terdapat **8.984** sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **1.621 (18,04%)** sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random / Acak



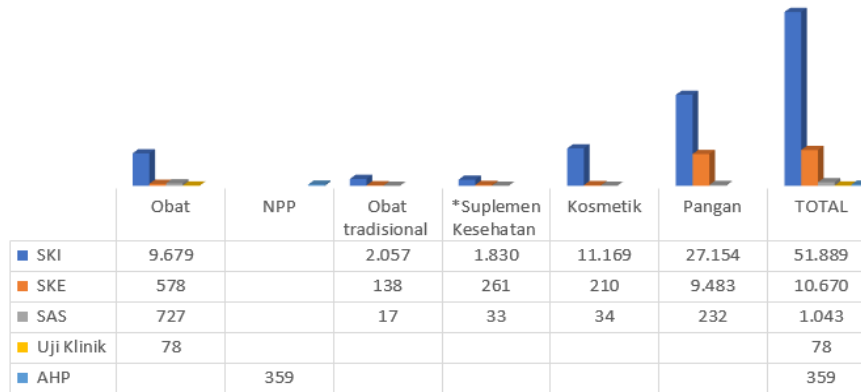
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Sampai dengan **Triwulan II tahun 2021**, dari **33.445 sampel random** yang disampling terdapat **25.468** sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **3.041 (11,94%)** sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa izin Edar

\* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan II tahun 2021** telah diterbitkan **51.889 SKI, 10.670 SKE, 1.043 SAS, 78 Uji Klinik, dan 359 AHP** Obat dan Makanan.

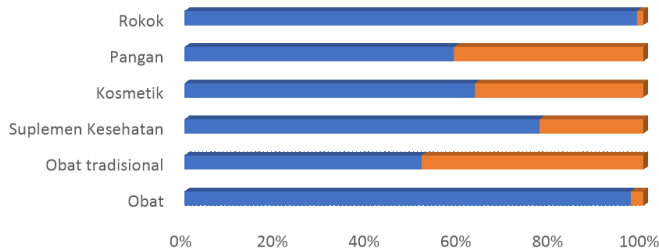


\* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

## Pengawasan iklan

4



	Obat	Obat tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok
■ MK	1.021	1.114	791	4.759	1.122	33.030
■ TMK	28	1.042	231	2.752	787	466



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, dari 47.143 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 5.306 (11,26%) iklan tidak memenuhi ketentuan.**

Gambar 8. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan

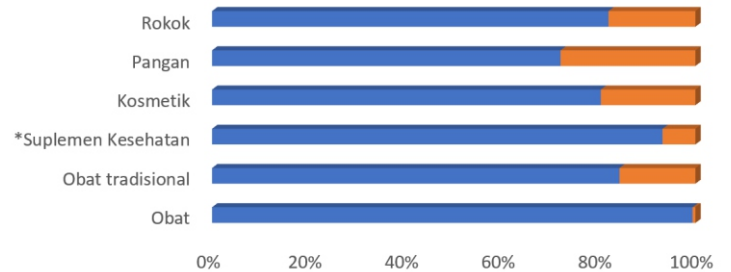


BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, dari 18.894 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 2.909 atau sekitar 13,34% label tidak memenuhi ketentuan.**

\* Termasuk Kuasi

## 5

## Pengawasan Label



	Obat	Obat tradisional	*Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok
■ MK	6.387	3.280	1.205	4.643	1.801	1.578
■ TMK	38	611	88	1.129	697	346

Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

## 6

## Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- ~ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya
- ~ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

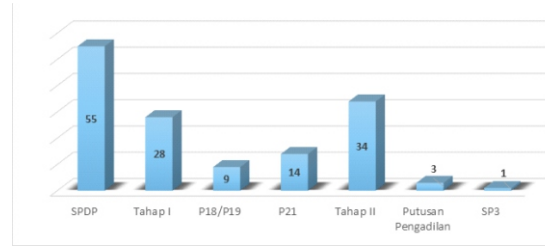


Komoditi	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindaklanjuti	%
Obat	4.032	2.912	72,22
Obat Tradisional	40	40	100,00
Suplemen Kesehatan	22	22	100,00
Kosmetik	240	187	77,92

Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping

## II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari –Juni 2021)

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 144 perkara dengan jumlah nilai barang bukti sebesar Rp11.931.157.632,-. Sebanyak 55 perkara masih dalam tahap SPDP, 28 perkara pada tahap I, 9 perkara pada tahap P18/19, 14 perkara pada tahap P21, 34 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II), 3 perkara telah sampai pada putusan pengadilan, dan 1 perkara pada tahap pemberhentian penyidikan (SP3).

## III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



### Obat

Terdapat 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik untuk Laboratorium Pengolahan Sel, Sel Punca dan Jaringan (28,57%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman CPOB Fasilitas *Dispensing* Obat di Rumah Sakit (28,57%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pelaporan Kegiatan Distribusi Obat dan Bahan Obat (100%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat dalam Rangka Bukan Perdagangan (42,86%).
5. Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (71,43%).
7. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik (71,43%).
8. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Revisi Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Antibakteri (14,29%).
9. Standar Obat Non Komedial (85,71%).
10. Standar Mutu Produk Radiofarmaka (71,43%).
11. Peraturan Badan POM tentang Metode Analisis, Standar dan/atau Persyaratan Obat dan Bahan Obat dalam Rangka Pengawasan Obat dan Bahan Obat (42,86%).
12. Pedoman Nitrosamin dan Turunannya dalam Obat dan Bahan Obat (33,33%).



## Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Terdapat 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II:

1. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Tanaman Obat Tradisional Tertentu sebagai Obat Tradisional Untuk Keperluan Khusus (60%).
2. Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional Lanjutan (60%).
3. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional (60%).
4. Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan) (60%).
5. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan dan Registrasi Obat Kuasi (80%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (60%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (60%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) kajian, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kajian di bidang obat tradisional, 30 (tiga puluh) kajian di bidang suplemen kesehatan, dan 15 (lima belas) kajian di bidang kosmetik. Sampai dengan Triwulan II ini telah diselesaikan sebanyak 92 kajian yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) kajian di bidang Obat Tradisional, 41 (empat puluh satu) kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 9 (sembilan) kajian di bidang Kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder*. Topik kajian dapat berupa bahan baku baru, jenis sediaan baru ataupun teknologi pembuatan produk yang baru.



## Pangan

Terdapat 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. *Review* Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan: Lampiran I-II (20%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (30%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bahan Tambahan Pangan Campuran (100%).
4. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan (terkait Probiotik) (50%).
5. Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil (60%).
6. Pedoman Implementasi Regulasi Makanan Pendamping - Air Susu Ibu (MPASI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (60%).
7. Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah/Pangan Steril Komersial untuk UMKM Pangan (60%).
8. Amandemen Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (100%).

9. Pedoman Implementasi Kategori Pangan 16.0 (Pangan Siap Saji Terkemas) (60%).
10. Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) Sinkronisasi Regulasi dan Standar Air Minum (termasuk Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang) (60%).

Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah 200 (dua ratus) kajian. Sampai dengan triwulan II telah diselesaikan 134 (seratus tiga puluh empat) kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

## IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2021 dengan progres triwulan II sebagai berikut:

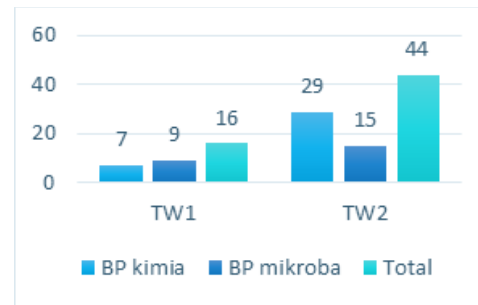
1. Kajian dalam rangka Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM (51%).
2. Desain dan Metodologi Survei Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan (48%).
3. Kajian Pengendalian Resistensi Antimikrobia (60%).
4. Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung UMKM (60%).
5. Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Mikroplastik dan *Emerging Issue* pada Air Minum dan Air Produksi Obat dan Makanan (62%).
6. Kajian Keamanan Pangan INARAC : Cemaran Arsen Inorganik dalam Produk Beras dan Produk Ikan (65%).
7. Kajian Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat Dan Makanan (DAK POM) (42%).

## V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. **Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)**  
Pemenuhan *roadmap* pemenuhan *GLP*/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) dilakukan melalui pembinaan ke Balai POM melalui pelatihan dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi Balai POM, penyelenggaraan Uji Profisiensi/Kolaborasi sesuai parameter ruang lingkup pengujian. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II adalah monitoring pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM sesuai *roadmap* yang sudah ditetapkan dan disepakati melalui *desk*. Dari monitoring dan evaluasi *roadmap* pada triwulan II ini didapatkan capaian SKL PPPOMN sebesar 76,05%, sedangkan Balai Besar/Balai POM 70,4% sehingga progres capaian Pemenuhan SKL pada triwulan II adalah 73,2% dari target 76% padaakhir tahun. Hasil monitoring evaluasi ini digunakan sebagai acuan tindak lanjut intervensi untuk pemenuhan SKL pada triwulan berikutnya.
2. **Metode Analisis (MA) yang dikembangkan**  
PPPOMN terus mengembangkan metode analisis (MA) obat dan makanan agar laboratorium BPOM dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar. Pengembangan Metode Analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, produk biologi, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan. Sampai dengan tahun 2020, telah dikembangkan MA sebanyak 1.489, dan sampai dengan tahun 2024 akan dikembangkan sebanyak 2.289 MA. Pada tahun 2021, sampai dengan Triwulan II telah dikembangkan MA sebanyak 82, sehingga MA yang dikembangkan sampai dengan Triwulan II tahun 2021 adalah sebanyak 1.555 MA (67,93%) dari 2.289 MA yang ditargetkan s.d Tahun 2024.

### 3. Baku Pembanding yang dikembangkan

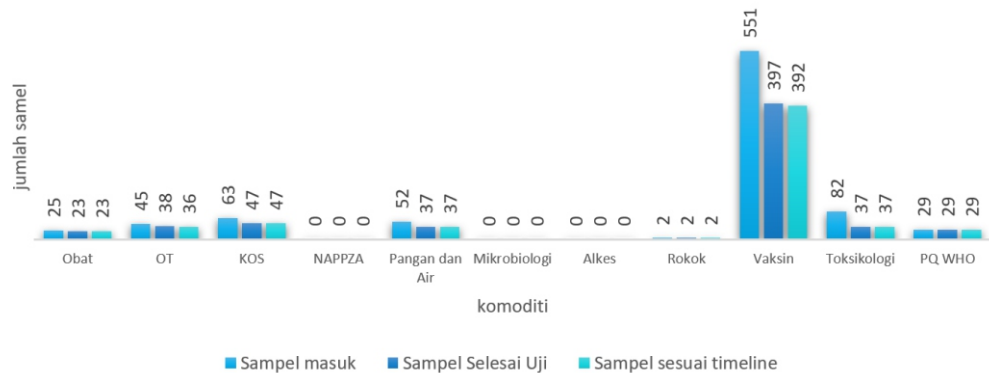
Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 telah dikembangkan baku pembanding sebanyak 44, yaitu 29 BP kimia dan 15 BP mikroba.



Gambar 12. Grafik Baku Pembanding yang dimanfaatkan (Januari – Juni 2021)

### 4. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

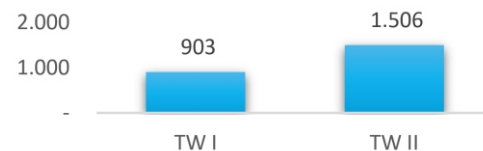
PPPOMN selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian obat dan makanan termasuk sampel Pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel obat dan makanan. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 92%. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, terdapat 603 (98,85%) sampel yang sesuai timeline dari 610 sampel yang selesai uji dan 849 sampel yang masuk.



Gambar 13. Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

### 5. Alat Pengujian Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai dengan standar. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, telah dilakukan kalibrasi sebanyak 1.506 dari 3.016 alat (42,7%).



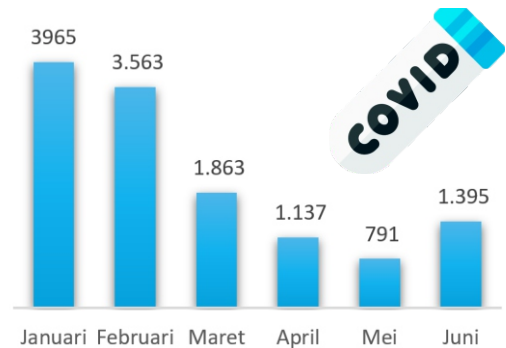
Gambar 14. Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar

## 6. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Sampai dengan triwulan II tahun 2021, telah terlaksana kegiatan 2 jejaring LRPPI pengujian Bahan Tambah Pangan dalam Pangan Olahan dan LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan.

## 7. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

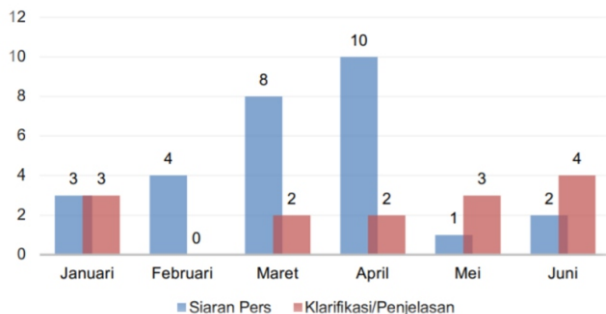
Di masa pandemi PPPOMN berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen covid-19 yang dilakukan di Laboratorium Biohazard. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, spesimen covid-19 yang diuji di Laboratorium *Biohazard* sebanyak 12.714 spesimen, dengan tren dari bulan Januari (3.965 spesimen) sampai dengan bulan Mei (791 spesimen) terlihat menurun, akan tetapi pada bulan Juni terlihat kenaikan (1.395 spesimen), dengan jumlah spesimen positif sebanyak 4.904 spesimen (38,57%).



Gambar 15. Grafik Pengujian Spesimen COVID 19

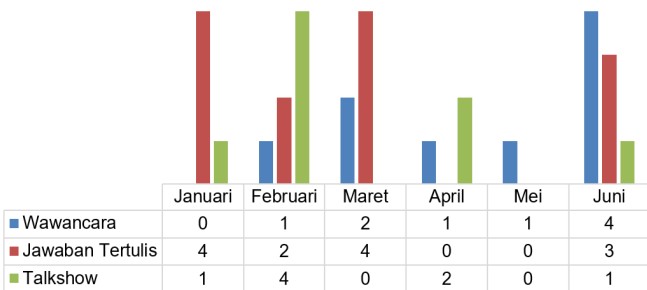
# VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Hingga triwulan II tahun 2021, Badan POM telah menerbitkan 28 (dua puluh delapan) siaran pers dan 14 (empat belas) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Pada triwulan ini, bahasan isu yang paling sering diterbitkan dalam siaran pers maupun penjelasan/klarifikasi adalah terkait Pengawasan Obat, dalam hal ini termasuk topik Vaksin dan Obat COVID-19 di mana Indonesia sedang melakukan program vaksinasi di tahun ini. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



Gambar 16. Grafik Penerbitan Siaran Pers

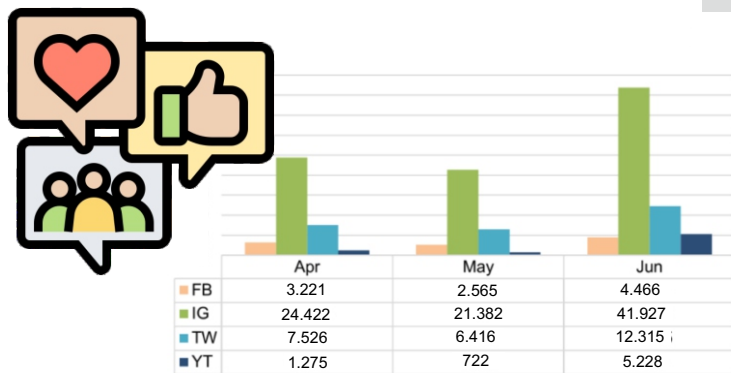
Sampai dengan periode triwulan II tahun 2021, Badan POM telah melakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, antara lain melalui 22 (dua puluh dua) kali wawancara langsung Pimpinan Badan POM dengan media dan 8 (delapan) kali *talkshow* atas permintaan media. Tiga belas dari dua puluh dua permohonan wawancara dari media atau sebesar 59,09% ditindaklanjuti melalui jawaban tertulis dari Badan POM. Pemberian jawaban secara tertulis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan efektivitas waktu penyampaian jawaban kepada media, terutama selama masa pandemi COVID-19.



Gambar 17. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media

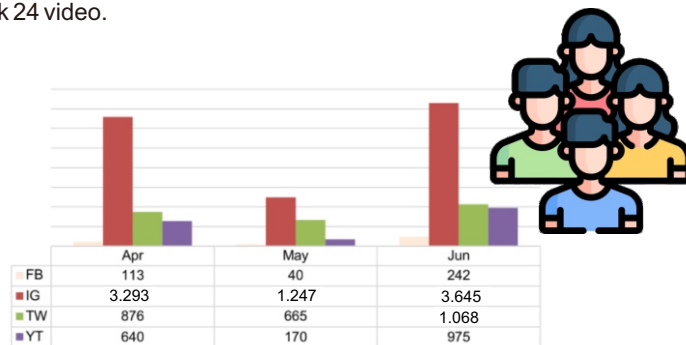
Pada triwulan II tahun 2021, aktifitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube mencapai 1.725 post, dengan rata-rata posting adalah 2-4 posting per hari. Platform Twitter memiliki aktifitas tertinggi sebanyak 806 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktifitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 469 post, menyusul Facebook sebanyak 426 post, serta Youtube sebanyak 24 video.

Sementara itu, pertumbuhan *audience* pada triwulan II terhadap 4 platform media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan platform dengan total *audience* tertinggi di triwulan II ini dengan jumlah *audience* sebanyak 8.185, sementara di peringkat kedua ada platform Twitter dengan jumlah *audience* sebanyak 2.609 *audience*, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah *audience* sebanyak 1.785 platform, dan Facebook dengan 395 *audience*. Pertumbuhan *audiens* tertinggi terjadi pada Juni, yaitu sebesar (5.930) disusul April (4.922) dan Mei (2.122). Total pertumbuhan audiens per bulan sejak Januari hingga Juni terpantau fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 4.025 audiens setiap bulannya.



Gambar 19. Profil Engagement Media Sosial Badan POM

Badan POM juga aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui *website* resmi Badan POM dan disebarakan ke media massa. Tercatat 88 (delapan puluh delapan) berita aktual yang telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM selama periode triwulan II tahun 2021. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Berdasarkan penilaian strategisnya, tidak seluruh peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual.



Gambar 18. Grafik Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM

Pada triwulan II, *engagement* pada setiap platform cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Juni, dengan jumlah 63.936, diikuti bulan April 36.444, dan Mei sebesar 31.085. Pertumbuhan jumlah *engagement* terlihat fluktuatif di 4 platform tersebut.



Badan Pengawas Obat dan Maku...  
Sun 6/27/2021 6:01 pm +07

Hai #SahabatBPOM, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) merupakan gerakan yang bertujuan mengajak...

Yuk, bantu POM memajukan karya yang sesuai!

1. Ceklis Logam  
2. Pulvis Obat  
3. Perawatan Tabung  
4. Inspeksi Bakteri  
5. Pengujian Zoonosis Pangan  
6. Pengujian Toksik Akut

1. Salomonella  
2. Merkuri  
3. Berat badan  
4. TC + TC  
5. Rhododanin B  
6. Chikank

Total Engagements 447

Penjelasan Badan POM RI terkait Penggunaan Ivermectin

1.744  
Total Engagement

bpom\_ri  
Mon 6/7/2021 5:59 pm +07

#SahabatBPOM, siapa yang ingin bergabung menjadi bagian garda terdepan dalam mengawal obat dan makanan aman di Indonesia?...

INFORMASI PENERIMAAN CPNS BADAN POM TAHUN ANGGARAN 2021

Pantau selalu Informasi resmi melalui kanal

www.bpm.go.id  
cpna.pom.go.id

Nantikan ya!

Total Engagements 4,313

3 PILAR SISTEM PENGAWASAN BADAN POM

BPOM INDUSTRI MASYARAKAT

#BPOMRI #BPOMMobile #PengawasanBPOM

TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik-KIPP 2021 BPOM Mobile: Indonesia Yakini Obat & Makanan Aman

4.645 x ditonton • 28 Jun 2021

2.1 RB 0 BAGIKAN SIMPAN

Gambar 20. Top engagement content Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube

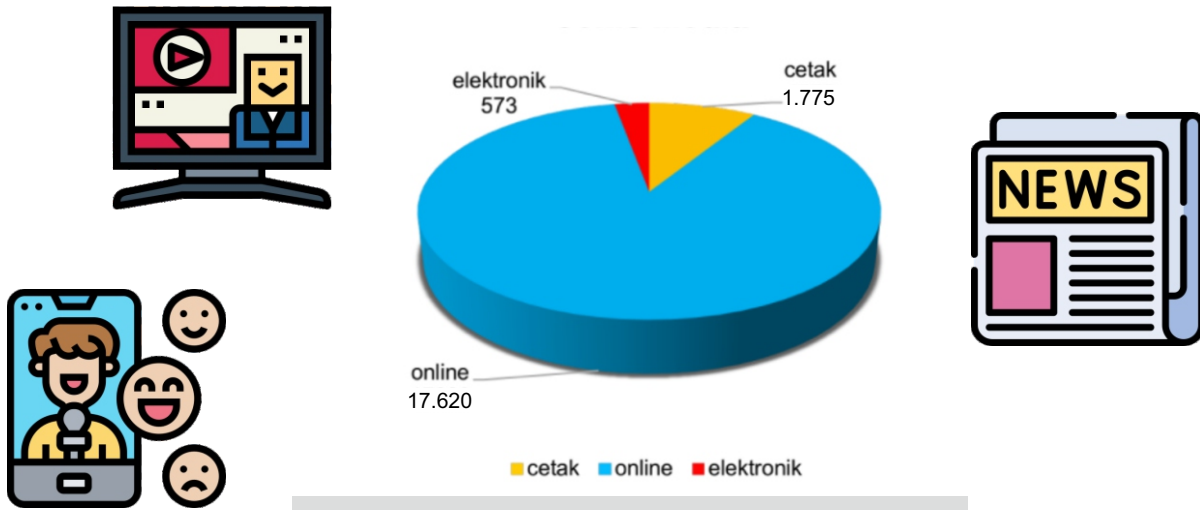
Hingga triwulan II tahun 2021 terdapat 19.968 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum dan Badan POM secara khusus. Dari 19.968 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 12.397 berita (62,08%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 7.536 berita (37,74%) dan 35 berita (0,18%) bertonasi negatif.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	1.887	2.203	1	4.091
Februari	1.142	1.615	1	2.758
Maret	1.240	2.678	0	3.918
April	1.255	2.819	7	4.081
Mei	947	1.751	0	2.698
Juni	1.065	1.331	26	2.422

Gambar 21. Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM

Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media online, yaitu sebanyak 17.620 berita (88,24%), selanjutnya diikuti 1.775 berita (8,89%) melalui media cetak dan 573 berita (2,87%) melalui media elektronik.





Gambar 22. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media

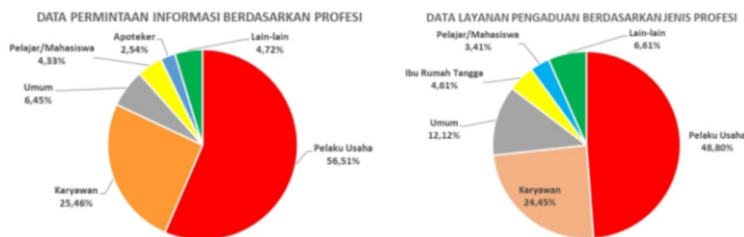
Pada Januari 2021 diawali dengan pemberitaan terkait EUA vaksin COVID-19 yang pertama kali diterbitkan dan vaksinasi perdana dilaksanakan. Hal tersebut memicu jumlah pemberitaan untuk Badan POM. Sedangkan pada Februari terdapat 2 kali penerbitan EUA yaitu untuk vaksin CoronaVac yang diizinkan digunakan untuk lansia serta vaksin COVID-19 produksi Bio Farma, kedua EUA tersebut cukup banyak menarik perhatian media.

Pada Maret, pemberitaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, beberapa cukup berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pemberitaan, diantaranya terkait isu penghentian penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca mengenai masalah pembekuan darah di Eropa, dan isu terkait perizinan vaksin Nusantara yang dibahas pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI.

Pada April 2021, jumlah pemberitaan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pemberitaan terkait polemik vaksin Nusantara gagasan Terawan Agus Putranto. Puncaknya adalah dilakukannya uji klinik fase kedua vaksin Nusantara terhadap beberapa tokoh, anggota DPR RI, politisi dan ditutup dengan pemberitaan terkait Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Badan POM dan TNIAD yang mengubah status vaksin Nusantara menjadi vaksin berbasis penelitian.

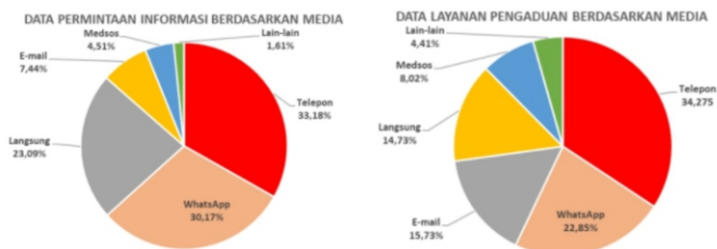
Masuk ke bulan Mei, jumlah pemberitaan mengalami penurunan. Pemberitaan beralih ke polemik vaksin AstraZeneca. Pemerintah menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 karena dilakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin. Mengakhiri polemik terkait hal tersebut Badan POM menerbitkan keterangan resmi yang menjelaskan bahwa nomor *batch* dimaksud tidak ada keterkaitan antara mutu dan KIPi yang dilaporkan. Sedangkan jumlah pemberitaan pada Juni 2021 mengalami penurunan kembali. Pemberitaan yang muncul tak hanya terkait vaksin COVID-19. Pemberitaan terkait kandungan BPA pada galon AMDK, isu produk produksi Nestle yang tidak sehat hingga munculnya pemberitaan terkait penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19.

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Juni tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia serta *Contact Center* HaloBPOM 1500533 sebanyak 25.188 layanan, terdiri dari 24.190 (96,04%) layanan permintaan informasi dan 998 (3,96%) layanan pengaduan.

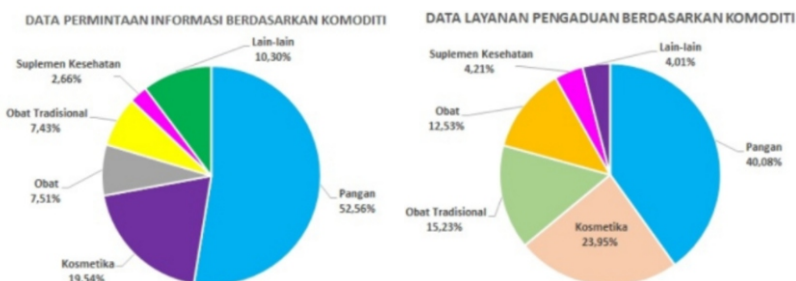


Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui telepon sebanyak 8.026 (33,18%) layanan dan aplikasi WhatsApp sebanyak 7.298 (30,17%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 342 (34,27%) dan aplikasi WhatsApp sebanyak 228 (22,85%) layanan.

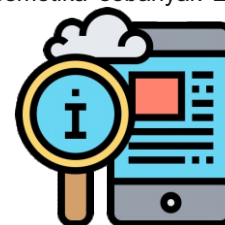


Gambar 24. Profil Media Komunikasi yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Layanan Informasi



Gambar 25. Profil Layanan Informasi yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait informasi pangan sebanyak 12.714 (52,56%) layanan dan kosmetika sebanyak 4.727 (19,54%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadakan juga yaitu pangan sebanyak 400 (40,08%) layanan dan kosmetika sebanyak 239 (23,95%) layanan.



# Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021



## VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

### a. Implementasi pemeriksaan intensifikasi COVID-19 pada sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian pada Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Modul ini dibangun pada awal tahun 2021 sesuai dengan amanat dari Perpres No. 99 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Tujuan dari dibangunnya modul ini adalah untuk pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaannya di masyarakat.

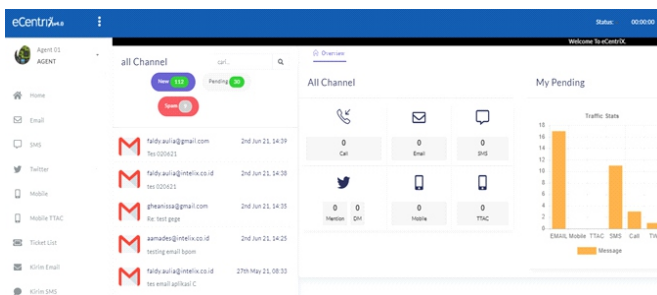
Mekanisme pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin COVID-19 antara lain:

- Intensifikasi pengawalan pengelolaan vaksin COVID-19 di Puskesmas dan RS
- Pendampingan perbaikan dalam rangka pengelolaan vaksin
- Bimbingan teknis pengelolaan vaksin COVID-19 bagi pengelola di PKM dan RS

Saat ini sarana yang terlibat dalam pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin COVID-19 yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Pada aplikasi SIPT, *tools* hanya berfokus pada pengelolaan *Cold Chain Product* (CCP) vaksin COVID-19.

Gambar 25. Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensifikasi COVID-19

### b. Perkuatan Operasional *Backoffice Contact Center*



Gambar 26. Tampilan Baru Aplikasi *Contact Center*

Dengan adanya *Contact Center* Halo BPOM 1500533 maka masyarakat dapat melaporkan maupun meminta informasi terkait Obat dan Makanan. Aplikasi *Contact Center* dengan beberapa menu layanan publik yang terintegrasi, di antaranya menu layanan media social twitter @HaloBPOM1500533, telepon, SMS, email dan Aplikasi Halo BPOM versi *Mobile* memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan dan mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Aplikasi *contact center* sudah dilakukan *upgrade* sistem yang bersifat *omni channel* karena menggabungkan semua *channel* di dalam satu aplikasi agar lebih *user friendly*.

Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan aplikasi *contact center* yaitu pengembangan modul media sosial dan pengembangan modul whatsapp. Pengembangan ini bertujuan agar medsos dan whatsapp berada di dalam aplikasi *contact center* untuk memudahkan *agent* dalam merespon pertanyaan dari masyarakat karena hanya membuka satu aplikasi saja. Saat ini pengembangan tersebut sudah berada pada tahap pelaksanaan pengerjaan.

Adapun juga dilakukan masking nomor layanan 1500533 untuk *outbound call* yang nantinya apabila agent *contact center* melakukan panggilan keluar maka nomor yang akan muncul di masyarakat adalah nomor 1500533 dan saat ini sudah selesai dilaksanakan.

## VIII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, telah ditetapkan 18 (delapan belas) Peraturan Badan POM, 87 (delapan puluh tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, 66 (enam puluh enam) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

### 1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:  
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

### 3 Judul RPP



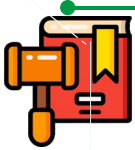
Rancangan Peraturan Pemerintah:  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.  
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

### 18 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat.
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Melalui Penyesuaian/Inpassing.
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan.
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol.
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan.
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.



8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Badan POM.
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan.
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 13 Tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa.
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Dan Menu Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2021 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota Dan Penyuluh Keamanan Pangan.
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik.
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional.

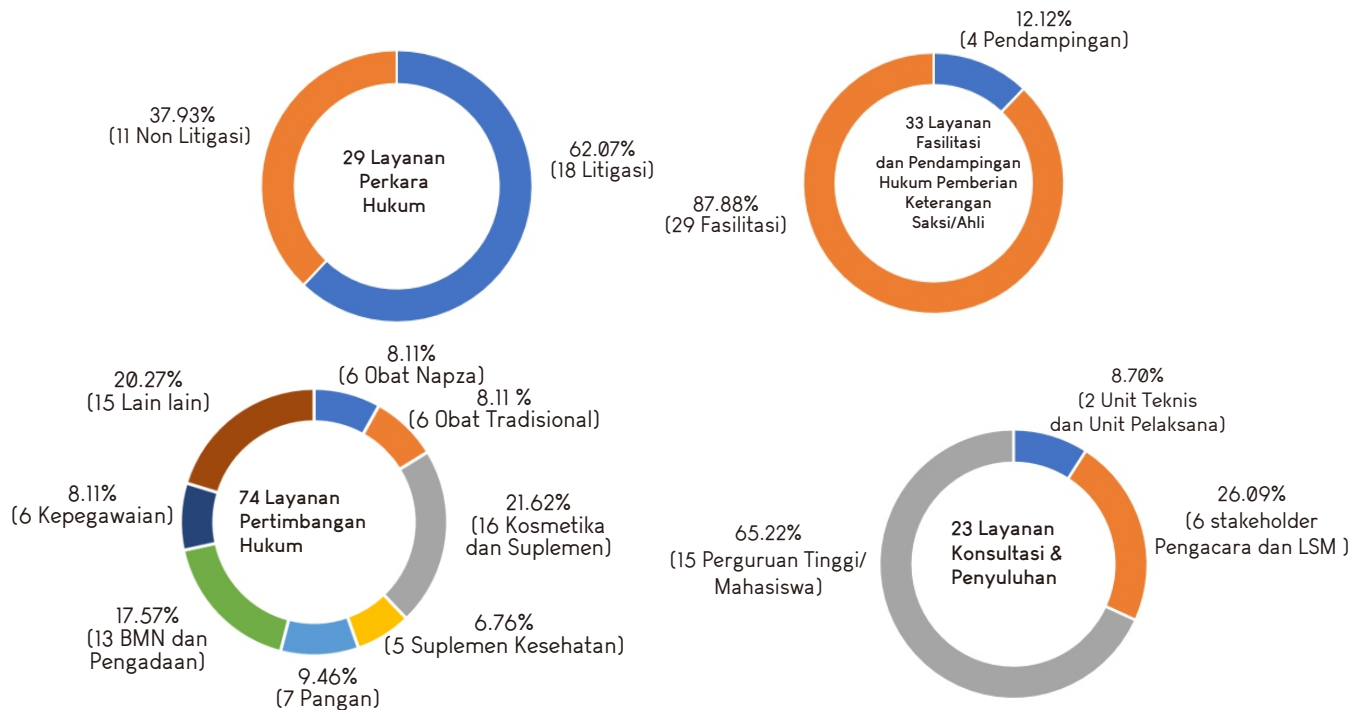
## IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

# Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 159 layanan yang terdiri dari:



## X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam rangka perkuatan kelembagaan BPOM khususnya UPT di Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/626/M.KT.01/2021 tanggal 24 Juni 2021 hal Usul Peningkatan Kelas UPT Loka POM Menjadi UPT Balai POM di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Peraturan BPOM Nomor 22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

**b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021**

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan Kementerian PANRB Tahun 2020 melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/23/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, Indeks RB BPOM mengalami kenaikan dari 80,12 menjadi 83,51 dengan kategori "A" (Sangat Baik).

**c. Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Hasil penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus UPP yang diikutkan pada penilaian evaluasi kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021.

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada April s.d. Juni 2021 oleh tim penilai internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Penilaian dilakukan melalui aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id) terhadap 47 (empat puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM.

**d. Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM**

Menindaklanjuti Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis di Instansi Pemerintah, BPOM telah melakukan tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro untuk tahun 2020 yang dimulai dari Minggu II Januari sampai Minggu V Maret 2021. Tinjau ulang proses bisnis merujuk pada prinsip SERA (simplification, elimination, re-engineering, dan automation) sehingga terdapat perubahan berupa penambahan, penyederhanaan, atau penggabungan pada bisnis proses, subbisnis proses atau SOP Makro dari yang sebelumnya sudah ada menjadi sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA	MENJADI
Peta Proses <u>Bisnis</u>	16	16
Peta <u>Subproses</u> Bisnis	36	37
Peta Lintas <u>Fungsi</u>	55	54
SOP Makro	83	93

Sosialisasi hasil tinjau ulang Proses Bisnis dan SOP Makro dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 dipimpin Sekretaris Utama dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta Manajemen Representatif dan Auditor Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM secara daring melalui zoom meeting. Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan hasil tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro, sosialisasi Petunjuk Teknis Audit Internal BPOM adalah tindak lanjut dari rencana implementasi Manual Organisasi BPOM Tahun 2021 yang merupakan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017.

**e. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM**

*Awareness* QMS ISO 9001:2015 merupakan salah satu kegiatan untuk peningkatan kompetensi personil dalam rangka penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 April 2021 di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan *Awareness* QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi Manajemen Representatif, Tim Penjamin Risiko, dan Tim Auditor Internal seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM. *Awareness* QMS ISO 9001:2015 BPOM tahun 2021 dibuka Sekretaris Utama dan dihadiri Koordinator Manajemen Representatif BPOM dan Manajemen Representatif seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM. Pada tahun ini materi *Awareness* ISO 9001:2015 lebih ditekankan pada implementasi untuk klausul 9.2 Audit Internal dan klausul 9.3 Tinjauan Manajemen dalam ISO 9001:2015 sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit internal dan audit eksternal tahun 2020. Diharapkan pelaksanaan kedua klausul tersebut pada tahun 2021 dapat dikelola dengan baik sehingga tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian pada klausul dimaksud.

**f. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja di Lingkungan BPOM**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.21.173 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM. Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor OT-02.02.2.22.06.21.280 tentang Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Unit Kerja dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM, kegiatan dilaksanakan sesuai persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3. *Management Review*. RTM dilakukan melalui tatap muka langsung dan atau secara daring pada Unit Kerja terkait.

## **XI. Kerjasama Internasional**

**a. Perkuatan Kerja Sama Internasional untuk Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19.**

Pengawasan terhadap pengembangan vaksin untuk mempercepat akses dan ketersediaan vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu di masyarakat terus dilakukan. Tidak hanya itu, Badan POM juga terus menelusuri potensi pengembangan, keamanan dan kualitas vaksin COVID-19 dengan regulator obat negara lain di dunia diantaranya Hongaria dan Rusia.

**Pemerintah Hongaria Gunakan *Eastern* dan *Western Vaccines* dalam Program Vaksinasi Nasional**

Hongaria memiliki kebijakan penggunaan variasi *eastern vaccines* (Sinopharm dan Sputnik V) dan *western vaccines* (Pfizer, Astra Zeneca dan Janssen). Meskipun kebijakan penggunaan *eastern vaccines* ini menimbulkan pro dan kontra di negerinya, Pemerintah Hongaria mempertegas posisinya bahwa vaksinasi bukan merupakan isu politik tetapi merupakan isu kemanusiaan dan kesehatan. *National Institute of Pharmacy and Nutrition* atau *Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet* (OGYEI) merupakan otoritas regulator obat dan makanan di Hongaria. Dalam pertemuan bilateral antara Badan POM dengan OGYEI pada 4 Juni 2021 didapatkan informasi terkait upaya masing-masing otoritas regulator obat dalam penanganan pandemi di negaranya. Badan POM mengharapkan pertukaran informasi diantara kedua otoritas regulator obat terus berlanjut. Keduanya sepakat untuk mendorong kerja sama industri farmasi Indonesia dan Hongaria baik untuk membuka peluang ekspor bagi Industri Farmasi Indonesia, dengan menggunakan Hongaria sebagai hub untuk mendapat persetujuan dari *European Medicines Agency* (EMA) guna mempermudah masuk ke pasar Uni Eropa.

## Pemerintah Rusia Dukung Pengembangan Industri Farmasi Nasional

Rusia merupakan negara yang unggul di bidang farmasi terutama pengembangan obat dan vaksin karena kuatnya dukungan pemerintah kepada pusat-pusat penelitian (R&D). Contoh *success story* yang dilakukan pusat penelitian Rusia adalah *Gamaleya Institute* yang berhasil mengembangkan vaksin Ebola dan vaksin Sputnik V (Gam-COVID-Vac); serta *Chumakov Federal Scientific Center* yang berhasil mengembangkan beragam vaksin seperti vaksin polio, demam kuning dan CoviVac (vaksin COVID-19). Rusia merupakan pasar potensial bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan Indonesia. Rusia juga merupakan hub masuknya produk-produk Indonesia ke pasar Eropa Timur dan negara-negara Eurasia. Kondisi ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui kerja sama jangka panjang dengan *National Regulatory Authorities* di Rusia. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

- Menjajaki kerja sama dalam pengawasan obat dan vaksin, termasuk fasilitas produksi dan produk vaksin Sputnik-V dengan *Federal Service for Surveillance in Healthcare* (Roszdravnadzor) yakni lembaga yang berwenang melakukan *post market surveillance* obat dan vaksin termasuk *pharmacovigilance* dan pengujian laboratorium untuk lot *release* vaksin.
- Mendorong tercapainya kesepakatan dengan *The State Institute of Drugs and Good Practices* (SID&GP) untuk memajukan industri farmasi kedua negara melalui kemudahan masuknya obat produksi industri farmasi Indonesia ke pasar Rusia dan sebaliknya dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan aturan yang berlaku di kedua negara. Melalui kerja sama ini, akan didapat gambaran terkait sistem pengawasan obat di Rusia serta kapasitas industri farmasi di Rusia untuk menjadi benchmark pembangunan industri dan riset farmasi Indonesia.
- Penjajakan kerja sama dengan *Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology* dan *Russian Direct Investment Fund* (RDIF) berupa *joint production* dan *transfer of technology* antara industri farmasi di Indonesia dan Rusia yang memiliki kapasitas teknologi produksi yang maju. Usulan kerja sama G to G tersebut akan dituangkan dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI) antara Kementerian BUMN (industri farmasi BUMN) dan RDIF.
- Melakukan pertemuan dengan BIOCAD yang merupakan salah satu industri farmasi di bidang bioteknologi untuk pengobatan kanker dan beberapa penyakit lainnya. BIOCAD melakukan riset dan pengembangan obat inovasi serta memiliki fasilitas produksi berteknologi tinggi. Saat ini BIOCAD mengembangkan sarana produksinya untuk memproduksi vaksin COVID-19 dan melakukan riset pengembangan vaksin mRNA.



## b. Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM, Badan POM Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Radio Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Juni 2021, Kepala Badan POM, Penny K. Lukito telah menandatangani MoU dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki serta dengan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio (LPP RRI), Mohammad Rohanudin. Penandatanganan dilakukan pada acara peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia (World Food Safety Day) 2021 yang mengusung tema “*Safe Food Now for a Healthy Tomorrow*”. Kerja sama Badan POM dengan Kementerian Koperasi dan UKM ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pendampingan kepada para pelaku usaha melalui dukungan yang intensif dengan sinergi antar Kementerian/ Lembaga. Pendampingan UMKM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta meningkatkan perolehan izin edar.

Selain itu, MoU dengan LPP RRI difokuskan pada Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka pemberdayaan, serta mewujudkan konsumen cerdas dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. LPP RRI memiliki jaringan siaran yang luas sampai ke masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama ini, diharapkan informasi Obat dan Makanan dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok negeri.

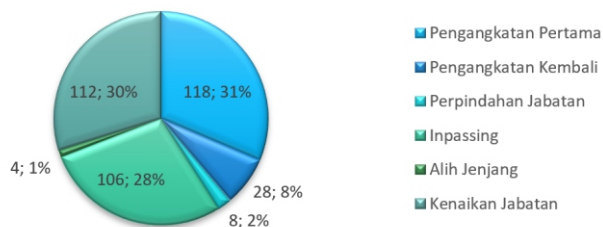
## XII. Sumber Daya Manusia

### a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM sampai dengan Tahun 2020-2024 diperoleh ABK sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pegawai pada tahun 2021.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi dari internal/eksternal, kenaikan jabatan, dan perpanjangan BUP. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan reviu ABK adalah tidak semua data pegawai pada aplikasi SIASN adalah data terkini, dan data pendukung untuk proses validasi ABK (seperti data sarana distribusi, produksi, dll) tidak lengkap sehingga menjadi salah satu hambatan dalam memverifikasi usulan ABK dari unit kerja. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi data pegawai di lingkungan Badan POM secara berkala.

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, telah dilakukan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/inpassing, pengangkatan kembali dan penyetaraan jabatan sebanyak 376 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 27. Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM

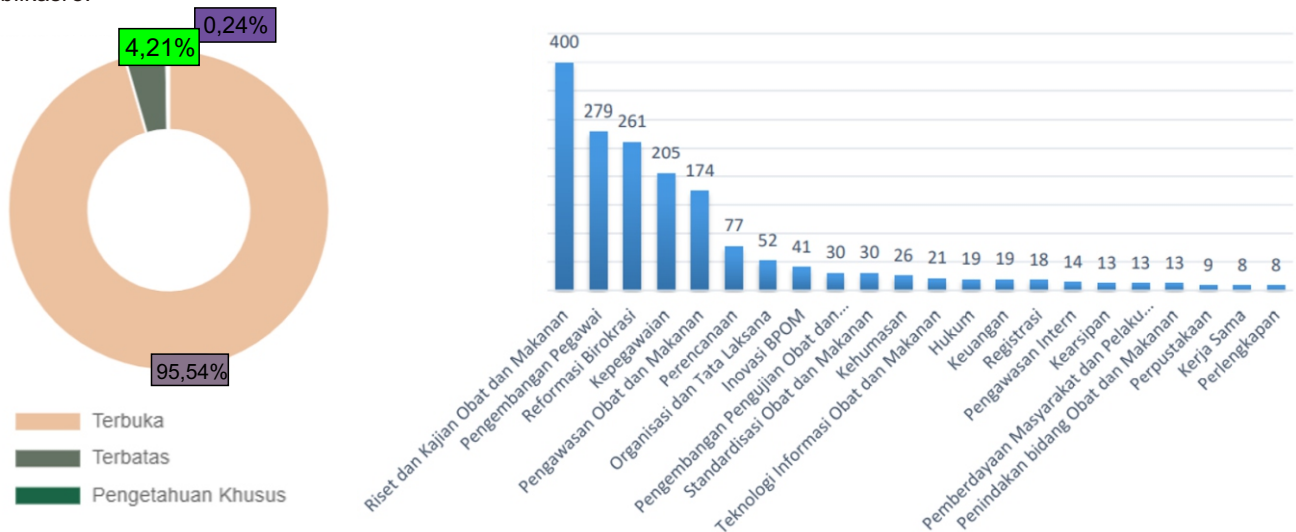
Penegakan Hukuman Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan POM sampai dengan bulan Juni 2021 yaitu sebanyak 21 orang pegawai dengan hukuman tingkat ringan 16 orang, sedang 2 orang dan berat 3 orang. Jenis pelanggaran peraturan kedisiplinan, pelanggaran jam kerja, izin perkawinan/perceraian, ketidakmampuan membimbing bawahan, dan tidak menjunjung harkat dan martabat PNS.

## b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS BPOM dalam mengembangkan kompetensi pegawai memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS BPOM adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Aplikasi IDEAS BPOM juga memiliki keunggulan berupa penerbitan sertifikat *online* dimana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

Sampai bulan Juni 2021, Aplikasi IDEAS BPOM sudah digunakan pegawai BPOM untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 6.481 peserta pelatihan tidak terjadwal dan 5.110 peserta webinar/diskusi *online*. Peserta yang lulus pelatihan tidak terjadwal sebanyak 3279 peserta sedangkan peserta yang lulus webinar/diskusi *online* sebanyak 4.683 peserta. Rata-rata nilai *post test* yang diperoleh peserta yaitu 74,98 untuk pelatihan tidak terjadwal dan 79,45 untuk webinar/diskusi online.

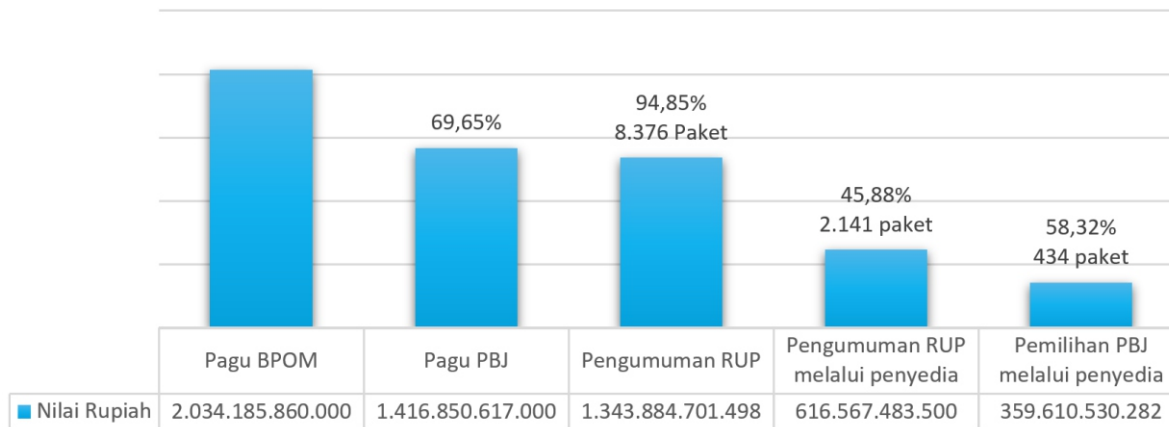
Aplikasi SIMPHONI merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI BPOM memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Sampai tahun 2021, SIMPHONI BPOM sudah diakses sebanyak 1.178 pegawai atau 95,54% dari total pengakses untuk pengetahuan terbuka, 52 pegawai atau 4,21% dari total pengakses untuk pengetahuan terbatas, dan 0,24% dari total pengakses untuk pengetahuan khusus. Sampai dengan bulan Juni 2021, sebanyak 1.730 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Pengetahuan yang telah dipublikasikan pada aplikasi SIMPHONI BPOM memiliki berbagai macam fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling banyak yaitu Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan jumlah publikasi 400 sedangkan fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling sedikit yaitu perlengkapan dengan jumlah publikasi 8.



Gambar 28. Grafik Akses dan data informasi yang ada pada Aplikasi SIMPHONI

### XIII. Pengadaan Barang Jasa

Pada Tahun 2021, total pagu belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) BPOM (Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal) adalah sebesar Rp 1.416.850.617.000,- (69,65%) dari total anggaran Badan POM (Rp 2.034.185.860.000,-). Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, dari total pagu PBJ BPOM tersebut telah diumumkan RUP 8.376 paket senilai Rp 1.343.884.701.498,- (94,85%), dimana RUP yang diumumkan melalui penyedia terdapat 2.141 paket dengan nilai Rp 616.567.483.500,- (45,88%) dari total RUP yang diumumkan. Pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 434 paket dengan nilai Rp 359.610.530.282,- (58,32%) dari RUP yang diumumkan melalui Penyedia.



### XIV. Pengelolaan anggaran

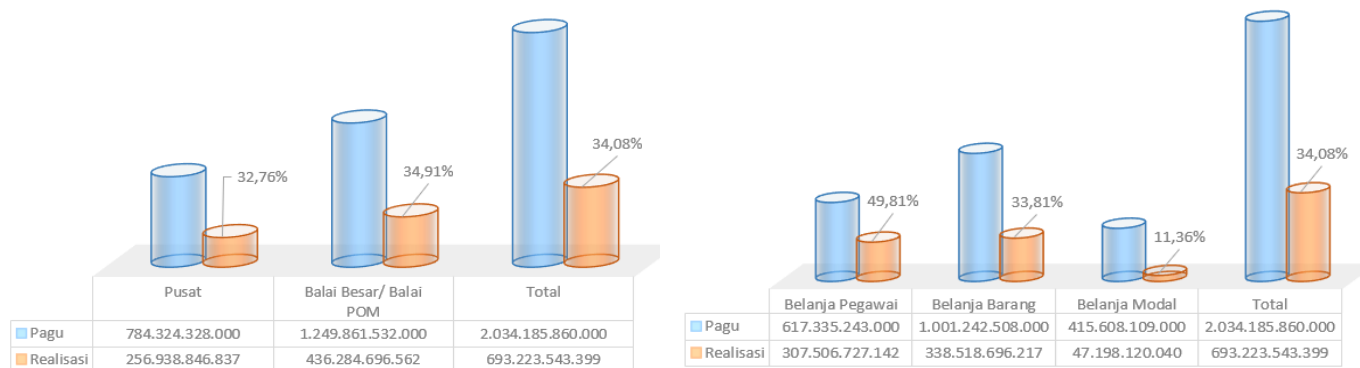
#### a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, estimasi penerimaan negara BPOM yang berasal dari PNBP sebesar Rp168.717.660.000,- yang terdiri dari PNBP fungsional sebesar Rp106.064.731.750,- dan PNBP umum sebesar Rp62.652.928.250,-. Dari jumlah tersebut, realisasi PNBP yang dapat dicapai adalah Rp110.217.259.819,- atau 65,32% dari target yang ditetapkan. Sedangkan, estimasi penggunaannya adalah Rp92.690.213.000,- dengan realisasi penggunaan PNBP mencapai Rp21.219.572.526 atau 22,89%.



## b. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II 2021

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.034.185.860.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 15 Loka Satker Mandiri. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp693.223.543.399,- (34,08%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 30 Satker Pusat Rp256.938.846.837,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp408.757.061.863,-, dan realisasi anggaran untuk Loka Satker Mandiri sebesar Rp27.527.634.699,-.



## XV. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2021. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebagaimana terlampir pada buku ini.

## PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan keglitan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous Improvement*.

# LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Kosmetik	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	79	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	%	akhir tahun	akhir tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,6	%	88,57	105,94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	%	86,75	108,44
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86	%	86,18	100,21
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	73	%	74,15	101,58
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	75	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89	%	86,76	97,48
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	60	%	52,69	87,82
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88	%	97	110,23

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	55	%	51,39	93,44
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	63	%	72,21	114,62
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3,76	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74	Nilai	93,49	126,34
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1.330	Sekolah	progres	33,09
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	427	Desa	progres	39,23
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	165	Pasar	progres	52,11
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	%	86,68	101,98
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	%	87,69	113,88
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	69	%	16,19	23,46
		Indeks RB UPT	85	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP UPT	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	Nilai Indeks	1,42	71
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	Nilai	61,67	65,61
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien	%	82,08	89,22

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	70	%	69	98,57
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	70	%	71	101,43
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	80	%	81	101,25
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	70	%	100	142,86
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2	Indeks	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	Efisien (89%)	%	75	84,27
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78	%	100	128,21
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	77	%	91,84	119,27
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	77	%	83,33	108,22
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai pedoman	50	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2	Nilai Indeks	1,5	75
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (89%)	%	92	103,37
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	80	%	86,99	108,74
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	63	%	59,94	95,14

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,46	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang di selesaikan tepat waktu	87	%	100	114,94
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	87	%	91,3	104,94
		Persentase Sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	87,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Diberikan	83	%	90,91	109,53
		Persentase tingkat pemahaman UPT terhadap sistem Pengawasan Produksi Pangan Olahan	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	70	%	36	51,42
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	125	Jumlah	progres	15
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi makanan	51	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	1	50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	Efisien (90%)	%	75	83,33
		1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86	%
Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86			%	63,36	73,67
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84			%	91,78	109,26
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	86			Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	86	%	89	103,49
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	82	%	54,34	66,27
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89	%	77,92	87,55
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91	%	97,54	107,19
		Indeks Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik	3,76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	Nilai Indeks	0,75	37,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	90	90
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	72	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	81	%	88,28	108,99
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	66	%	72,93	110,5
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	80	%	96,56	120,7
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,76	Nilai Indeks	4,08	108,51
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	91	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	77	Nilai Indeks	79,93	103,81

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	85,32	96,95
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	86,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	84,7	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	47	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.000	Permohonan	10.003	55,57
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	72	%	84,56	117,44
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,46	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	89,04	Nilai	92,49	103,87
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	72,22	103,17
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86	%	50,83	59,1
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.200	Label dan Iklan	34.608	57,49
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Efisien (98%)	%	84	85,71
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	30	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89,5	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang	60	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	%	87,38	92,96
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan peredaran makanan	65	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi dan produk Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95	%	82,53	86,87
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	2	Indeks	1,5	75
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	92	%	90	97,83
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	55	%	68	123,64
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi	86,5	Indeks	88,27	102,05

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian 7=6/4*100
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	74	%	84,62	114,35
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil Pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	33,33	35,08
		Persentase produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	86	%	33,5	38,95
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	74	%	65,5	88,51
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	70	%	59,69	85,27
		Indeks Pelayanan Publik	3,76	Indeks	4,26	113,3
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	65	%	64,29	98,91
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2	Indeks	1	50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	100	105,26
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	81	%	72,1	89,01
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	79	%	71,6	90,63
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	99,7	104,95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,36	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	76	%	93,02	122,39

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	40	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	1,75	87,5
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (97%)	%	78	80,41
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73	%	72,83	99,77
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	84,5	Indeks	88,54	104,78
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	66	%	61,5	93,18
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	73	%	79,35	108,7
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,76	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	81	%	20	24,69
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2	Indeks	0,75	0,81
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (93%)	%	92	98,92
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	86	%	78,45	91,22
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pralini/Klinik dan DIP	82	Nilai Indeks	84,5	103,05

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prاكلinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	72	%	84,83	117,82
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prاكلinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	73	%	94,71	129,74
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,76	Nilai Indeks	4,07	108,24
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	69	%	59,96	86,9
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Prاكلinik/Klinik dan DIP yang efektif	76	%	73,76	97,05
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	82	%	82,52	100,63
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2	%	2	100
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	75	78,13
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	90	%	100	111,11

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	90	%	63	70
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	90	%	100	111,11
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	%	96,74	107,49
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	Indeks	2,75	137,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	95	95
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100	%	100	100
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	92	%	60	65,22
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88	%	89,52	101,73
		Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	80	%	60	75
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85	%	100	117,65
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,06	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	3	150
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	78,2	78,2
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	83	%	75	90,36
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	86	%	57,54	66,91
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	88	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77	Nilai Indeks	75,31	97,81
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	100	100
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	52	UMKM	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	32	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	82	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	160	Kab/Kota	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	82	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	18.000	Jumlah	7.700	42,78
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	Jumlah	164	54,67
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	89,37	nilai	93,64	104,78
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,46	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	203	Prov/Kab/Kota	186	91,63
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100	%	56,16	56,16
		Indeks RB Dit PMPU	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2	Indeks	1,5	75
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (91%)	%	100	109,89
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	5	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPMN	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	%	67,93	91,8
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77	%	71,96	93,45
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	87	%	42,69	49,07
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	99,72	108,39
		Indeks Pelayanan Publik PPMN	4,06	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57	%	14,29	25,07
		Indeks RB PPMN	92	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP PPOMN	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	2	Indeks	1,75	87,5
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	94,15	nilai	55,05	58,47
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPOMN	Efisien (91%)	%	95	104,4
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	65	%	44,05	67,77
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	76	%	21,21	27,91
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	55	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	82	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2	Nilai Indeks	0,75	37,5
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (90%)	%	akhir tahun	akhir tahun
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	84	%	74,04	88,14
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	75	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	77	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2	Indeks	2,75	137,5
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	94	nilai	50,13	53,33
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (93%)	%	75	80,65
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45	%	20	44,44
		Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	82	%	40	48,78
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73	%	40	54,79
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK dan Kos	45	%	20	44,44
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar (s/d 2021)	87	%	26,67	30,66
		Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar (s/d 2021)	70	%	36	51,43
		Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	90,59	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,57	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	55	Komunitas	10	18,18
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (99%)	%	akhir tahun	akhir tahun
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase hasil patroli siber yang efektif	57	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	0,5	25
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	%	akhir tahun	akhir tahun
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	43,25	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	100
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	76,73	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Media	73,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	67	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	84	%	40,32	48
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	10,17	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,28	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,7	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	73	%	40,09	54,92
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	2	negara	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama dan Humas	3,84	Indeks	3,62	94,27
		Indeks kepuasan media	7,35	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	67	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82	%	85,48	104,24
		Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	84	Dokumen	36	42,86
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,6	%	99,64	100,04
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2	Indeks	0,25	12,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	Efisien (90%)	%	75	83,33
		2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	5,25	Nilai
Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	76,73			Nilai	akhir tahun	akhir tahun
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94			Nilai	75,04	79,83
Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,87			Nilai	72,94	76,88
Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100			%	50	50
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,8			Indeks	3,42	90
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	87			%	akhir tahun	akhir tahun
Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100			%	33	33
Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment	25,6			%	13,9	54,3

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	60	60
		Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	63	%	73	115,87
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	52,17	52,17
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	81	%	81	100
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	50	50
		Persentase laporan PNBPN unit kerja yang disampaikan tepat waktu	96	%	103	107,29
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	75,1	Nilai	82,24	109,51
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2	Indeks	2	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	Nilai	92	92
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,8	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,9	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,6	Indeks	3,74	103,89
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	60	60
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	83	%	92,21	111,1
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti	99,2	%	99,21	100,01

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang Dilaksanakan	90,76		94,18	103,77
		Indeks Pelayanan Publik	4,06	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2	%	0,25	12,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	85,42	89,92
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,2	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Sistem Merit	Level 4	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,71	Indeks	3,41	91,91
		Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	43,62	58,16
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik	91	%	99,85	109,73
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,21	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase ABK yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Data ASN yang Dimutakhirkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Biro SDM	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM yang optimal	2	Indeks	1	50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien (100%)	Indeks	86	86
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	82	%	74,74	91,15
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	820	SDM	412	50,24
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,3	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	45	%	36,3	80,67

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	12	Kerja Sama	6	50
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,4	Nilai	4,49	102,05
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	91	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	87	%	42	48,28
		Indeks RB PPSDM POM	90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	77	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2	Indeks	0,25	12,5
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94	Nilai	51,96	55,28
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (92%)	Nilai	92	100
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	3,95	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100	%	44,83	44,83
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,9	%	3,27	112,76
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	%	91,49	91,49
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	23	%	8	34,78
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100	%	30	30
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	55	%	46,02	83,67
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	40	40
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	49,16	49,16
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2	Indeks	1,5	75
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	25	%	35,17	140,68
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94	Nilai	69,51	73,95
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (89%)	Nilai	75	84,27
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,99	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	80	%	82,98	103,73
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	< 1	%	0,01	101
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90	%	93,47	103,86
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	45,45	45,45
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I	80	Nilai	74,99	93,74
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92	%	98,57	107,14
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	85	%	66,67	78,44
		Indeks RB Inspektorat I	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	86	Indeks	81,35	94,59
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2	Indeks	0,75	37,5
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (89%)	%	86	96,63

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,99	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	< 1	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	81	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	80	Nilai	74,99	93,74
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92	%	97,48	105,96
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	85	%	100	117,65
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	%	0	0
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	71,5	71,5
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	90	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Inspektorat II	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,7	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	Indeks	76,96	89,49
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2	Indeks	1,5	75
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (89%)	%	75	84,27

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	64% dari indeks	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,73	Indeks	3,33	89,28
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	80	Persen	35	43,75
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	87	Persen	88	101,15
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN	91	Persen	123,91	136,16
		Persentase Satker yang mengelola Pengadaan Brang/Jasa sesuai Perencanaan	91	Level	-	Akhir tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	75	Persen	87	112
		Indeks RB Biro Umum	83	Indeks	-	Akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	83	Indeks	-	Akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2	Indeks	0,25	12,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	Persen	75	75

# LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021  
SUMBER: APLIKASI OMSPAN  
(Per 30 Juni 2021)

## A. Unit Pusat

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan</b>	<b>371.484.816.000</b>	<b>132.001.987.044</b>	<b>35,53%</b>
1.1	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	14.318.263.000	3.355.950.125	23,44%
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	22.298.642.000	4.948.610.593	22,19%
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	14.316.366.000	3.509.295.676	24,51%
1.4	Biro Umum	310.858.575.000	117.395.370.641	37,76%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	9.692.970.000	2.792.760.009	28,81%
<b>2</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Baku</b>	<b>41.103.943.000</b>	<b>13.056.323.565</b>	<b>31,76%</b>
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Bahan Baku	7.647.335.000	2.309.754.193	30,20%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Bahan Baku	8.769.574.000	2.606.416.182	29,72%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Bahan Baku	8.230.939.000	2.261.188.325	27,47%
2.4	Dit. Registrasi Obat	8.800.000.000	2.753.479.298	31,29%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	7.656.095.000	3.125.485.567	40,82%
<b>3</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</b>	<b>41.023.718.000</b>	<b>14.429.839.326</b>	<b>35,17%</b>
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	9.274.111.000	4.548.576.860	49,05%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	8.087.950.000	2.959.624.349	36,59%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	8.900.772.000	2.520.020.024	28,31%
3.4	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.817.313.000	1.961.465.528	33,72%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	8.943.572.000	2.440.152.565	27,28%
<b>4</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>	<b>51.218.684.000</b>	<b>19.003.644.593</b>	<b>37,10%</b>
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	11.504.640.000	4.775.926.509	41,51%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	11.137.261.000	4.152.485.991	37,28%
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	8.500.000.000	2.870.573.221	33,77%
4.4	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	8.228.258.000	2.971.217.591	36,11%
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	11.848.525.000	4.233.441.281	35,73%
<b>5</b>	<b>Deputi Bidang Penindakan</b>	<b>30.406.163.000</b>	<b>10.168.715.856</b>	<b>33,44%</b>
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	5.653.600.000	1.820.376.644	32,20%
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	7.256.620.000	2.560.550.590	35,29%
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	7.783.087.000	2.370.503.632	30,46%
5.4	Dit. Cegah Tangkal	9.712.856.000	3.417.284.990	35,18%
<b>6</b>	<b>Inspektorat Utama</b>	<b>21.939.452.000</b>	<b>9.432.619.447</b>	<b>42,99%</b>
6.1	Inspektorat I	16.570.533.000	7.501.935.625	45,27%
6.2	Inspektorat II	5.368.919.000	1.930.683.822	35,96%
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	103.826.538.000	23.917.639.348	23,04%
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	22.297.974.000	5.607.831.501	25,15%
9	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52.974.727.000	10.304.882.537	19,45%
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	48.048.313.000	19.015.363.620	39,58%
	<b>TOTAL SATKER PUSAT</b>	<b>784.324.328.000</b>	<b>256.938.846.837</b>	<b>32,76%</b>

## B. Balai Besar / Balai POM

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Balai POM Sofifi	15.121.728.000	7.924.224.874	52,40%
2	Balai POM Mamuju	15.827.583.000	4.440.576.083	28,06%
3	Balai Besar POM Jakarta	46.199.752.000	16.377.763.273	35,45%
4	Balai Besar POM Bandung	55.434.598.000	16.187.424.470	29,20%
5	Balai Besar POM Semarang	51.501.656.000	17.437.339.245	33,86%
6	Balai Besar POM Yogyakarta	38.832.978.000	14.576.161.995	37,54%
7	Balai Besar POM Surabaya	49.750.847.000	19.547.804.014	39,29%
8	Balai Besar POM Banda Aceh	39.038.390.000	16.380.493.051	41,96%
9	Balai Besar POM Medan	53.519.562.000	19.075.750.917	35,64%
10	Balai Besar POM Padang	45.198.746.000	15.376.315.465	34,02%
11	Balai Besar POM Pekanbaru	36.722.389.000	13.137.472.794	35,78%
12	Balai POM Jambi	33.566.186.000	9.634.632.795	28,70%
13	Balai Besar POM Palembang	34.441.370.000	11.578.567.917	33,62%
14	Balai Besar POM Bandar Lampung	30.737.799.000	10.814.519.559	35,18%
15	Balai Besar POM Pontianak	31.122.027.000	11.309.033.597	36,34%
16	Balai Besar POM Palangkaraya	26.670.086.000	10.258.615.018	38,46%
17	Balai Besar POM Banjarmasin	54.730.000.000	14.463.666.136	26,43%
18	Balai Besar POM Samarinda	46.598.474.000	13.403.811.983	28,76%
19	Balai Besar POM Manado	41.283.591.000	12.915.100.373	31,28%
20	Balai POM Palu	32.450.802.000	8.789.610.069	27,09%
21	Balai Besar POM Makassar	49.042.232.000	16.028.159.506	32,68%
22	Balai POM Kendari	22.120.409.000	9.840.607.685	44,49%
23	Balai POM Ambon	24.282.165.000	10.396.606.497	42,82%
24	Balai Besar POM Denpasar	46.521.068.000	22.222.360.770	47,77%
25	Balai Besar POM Mataram	30.032.486.000	14.045.058.255	46,77%
26	Balai POM Kupang	31.860.052.000	9.883.455.013	31,02%
27	Balai Besar POM Jayapura	38.104.443.000	10.619.314.699	27,87%
28	Balai POM Bengkulu	30.586.486.000	11.456.712.338	37,46%
29	Balai Besar POM Serang	32.663.811.000	11.169.451.042	34,20%
30	Balai POM Batam	29.437.009.000	8.107.189.815	27,54%
31	Balai POM Pangkal Pinang	23.564.113.000	6.884.593.302	29,22%
32	Balai POM Gorontalo	22.161.582.000	6.147.539.373	27,74%
33	Balai POM Manokwari	27.529.064.000	8.327.129.940	30,25%
	<b>TOTAL SATKER BALAI</b>	<b>1.186.653.484.000</b>	<b>408.757.061.863</b>	<b>34,45%</b>

### C. Loka POM Satker Mandiri

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Loka POM Kota Surakarta	5.162.161.000	2.184.936.368	42,33%
2	Loka POM Kota Tasikmalaya	4.176.059.000	1.942.654.329	46,52%
3	Loka POM Kabupaten Kediri	3.399.269.000	1.577.204.193	46,40%
4	Loka POM Kabupaten Jember	3.357.774.000	1.467.847.171	43,71%
5	Loka POM Kabupaten Banyumas	3.681.073.000	1.693.270.038	46,00%
6	Loka POM Kota Palopo	4.160.712.000	1.800.800.274	43,28%
7	Loka POM Kabupaten Bogor	4.157.868.000	1.872.389.297	45,03%
8	Loka POM Kabupaten Tangerang	4.160.806.000	1.950.656.885	46,88%
9	Loka POM Kota Tarakan	6.362.226.000	2.839.297.599	44,63%
10	Loka POM Kota Dumai	4.291.677.000	1.643.132.368	38,29%
11	Loka POM Kota Baubau	4.315.943.000	1.669.277.637	38,68%
12	Loka POM Kota Lubuklinggau	3.367.178.000	1.503.046.646	44,64%
13	Loka POM Kabupaten Mimika	3.751.058.000	1.683.119.550	44,87%
14	Loka POM Kabupaten Ende	4.536.486.000	1.832.385.827	40,39%
15	Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	4.327.758.000	1.867.616.517	43,15%
	<b>TOTAL SATKER LOKA MANDIRI</b>	<b>63.208.048.000</b>	<b>27.527.634.699</b>	<b>43,55%</b>
	<b>TOTAL SATKER PUSAT DAN UPT</b>	<b>2.034.185.860.000</b>	<b>693.223.543.399</b>	<b>34,08%</b>

# LAMPIRAN III

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
FUNGSIONAL  
(Per 30 Juni 2021)

## Pendapatan Negara Bukan Pajak Fungsional Badan Pengawas Obat dan Makanan

No	Nama Unit	Nilai
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	286,940,000
2	Balai Besar POM Serang	91,840,000
3	Balai Besar POM di Dki Jakarta	10,050,000
4	Balai Besar POM di Bandung	320,690,000
5	Balai Besar POM di Semarang	326,530,000
6	Balai Besar POM di Yogyakarta	97,780,000
7	Balai Besar POM di Surabaya	1,192,670,000
8	Balai Besar POM di Pontianak	433,970,000
9	Balai Besar POM Palangkaraya	238,620,000
10	Balai Besar POM di Banjarmasin	423,330,000
11	Balai Besar POM di Samarinda	159,830,000
12	Balai POM di Gorontalo	55,370,000
13	Balai Besar POM di Manado	123,825,000
14	Balai POM di Palu	73,790,000
15	Balai Besar POM di Makassar	141,475,000
16	Balai POM di Kendari	178,215,000
17	Balai Besar POM di Denpasar	198,875,000
18	Balai Besar POM di Mataram	642,390,000
19	Balai POM di Kupang	104,425,000
20	Balai POM di Ambon	66,510,000
21	Balai Besar POM di Jayapura	127,045,000
22	Balai POM di Manokwari	71,110,000
23	Balai POM di Mamuju	650
24	Sekretariat Utama	0
25	Loka POM di Kabupaten Ende	2,290,000
26	Direktorat Registrasi Obat	17,414,800,000
27	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	1,225,300,000
28	Direktorat Pengawasan distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	1,378,500,000

No	Nama Unit	Nilai
29	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	965,950,000
30	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	42,981,600,000
31	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	817,500,000
32	Direktorat Pengawasan Kosmetik	9,211,150,000
33	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	0
34	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	15,106,175,000
35	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah Dan Sedang	6,284,300,000
36	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi Dan Teknologi Baru	282,000,000
37	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	2,791,016,750
38	Balai Besar POM di Banda Aceh	59,845,000
39	Balai Besar POM di Medan	531,365,000
40	Balai Besar POM di Padang	402,990,000
41	Balai Besar POM di Pekanbaru	172,230,000
42	Balai POM di Batam	378,800,000
43	Balai Besar POM di Palembang	74,260,000
44	Balai POM di Pangkal Pinang	54,185,000
45	Balai POM di Jambi	415,565,000
46	Balai POM di Bengkulu	148,980,000
47	Belum dikonfirmasi	0
<b>Total</b>		<b>106,064,731,750</b>

# LAMPIRAN IV

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
FUNGSIONAL  
(Per 30 Juni 2021)

## Pendapatan Negara Bukan Pajak Fungsional Badan Pengawas Obat dan Makanan

No	Nama Satuan Kerja	RUP Melalui Penyedia	Pemilihan	%
1	Balai POM di Bengkulu	8.442.443.000	8.847.340.092	104,80%
2	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	450.000.000	449.988.000	100,00%
3	Balai Besar POM di Samarinda	23.733.548.000	21.990.510.587	92,66%
4	Balai Besar POM di Palembang	13.322.748.000	11.978.227.518	89,91%
5	Balai POM di Kendari	5.065.434.000	4.417.814.468	87,21%
6	Balai Besar POM di Mataram	7.134.020.000	6.117.991.940	85,76%
7	Balai POM di Pangkal Pinang	6.754.380.000	5.531.326.797	81,89%
8	Balai POM di Sofifi	3.547.023.000	2.839.855.700	80,06%
9	Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.017.052.000	807.404.999	79,39%
10	Balai Besar POM di Denpasar	14.767.157.000	11.637.638.641	78,81%
11	Balai Besar POM di Medan	17.486.448.000	13.743.655.916	78,60%
12	Balai Besar POM di Makassar	11.070.163.000	8.447.931.350	76,31%
13	Balai Besar POM di Pontianak	8.923.855.000	6.677.770.784	74,83%
14	Balai Besar POM di Surabaya	11.534.771.000	8.416.446.040	72,97%
15	Balai Besar POM di Palangkaraya	5.816.372.000	4.229.384.450	72,72%
16	Balai POM di Batam	9.611.464.000	6.941.728.202	72,22%
17	Balai Besar POM di Yogyakarta	13.619.349.000	9.738.877.962	71,51%
18	Loka POM di Kota Surakarta	926.991.000	661.900.000	71,40%
19	Balai Besar POM di Serang	13.246.301.000	9.217.012.853	69,58%
20	Loka POM di Kota Tarakan	870.385.000	597.725.000	68,67%
21	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	54.217.252.000	36.967.641.900	68,18%
22	Balai Besar POM di Bandung	14.146.102.000	9.599.430.585	67,86%
23	Balai Besar POM di Banjarmasin	28.555.544.000	18.826.414.754	65,93%
24	Loka POM di Kabupaten Banyumas	325.300.000	214.300.000	65,88%
25	Balai POM di Ambon	8.130.632.000	5.315.345.629	65,37%
26	Loka POM di Kabupaten Bogor	579.120.000	374.600.000	64,68%
27	Loka POM di Kota Tasikmalaya	403.500.000	255.502.000	63,32%
28	Balai Besar POM di Banda Aceh	12.473.466.000	7.811.829.405	62,63%
29	Balai Besar POM di Manado	11.933.614.000	7.468.570.485	62,58%

No	Nama Satuan Kerja	RUP Melalui Penyedia	Pemilihan	%
30	Balai Besar POM di Semarang	9.920.441.000	6.167.024.261	62,16%
31	Balai Besar POM di Jayapura	11.195.202.000	6.943.972.900	62,03%
32	Loka POM di Kota Lubuklinggau	454.064.000	280.400.000	61,75%
33	Sekretariat Utama Badan POM	94.879.213.000	57.628.468.243	60,74%
34	Balai POM di Jambi	11.820.176.000	7.093.841.200	60,01%
35	Balai POM di Manokwari	10.566.520.000	5.985.944.686	56,65%
36	Balai Besar POM di Padang	9.510.838.000	5.336.494.000	56,11%
37	Balai POM di Palu	15.069.592.000	8.362.858.587	55,49%
38	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.178.288.000	4.349.425.500	53,18%
39	Loka POM di Kabupaten Kediri	216.700.000	111.700.000	51,55%
40	Balai Besar POM di Jakarta	18.879.405.000	9.336.748.150	49,45%
41	Balai POM di Gorontalo	5.849.932.000	2.875.414.803	49,15%
42	Balai Besar POM di Bandar Lampung	7.741.901.000	3.258.913.544	42,09%
43	Pusat Riset Dan Kajian Obat Dan Makanan	10.223.752.000	3.074.728.800	30,07%
44	Balai POM di Kupang	8.682.167.000	2.259.071.212	26,02%
45	Loka POM di Kabupaten Jember	294.960.000	49.750.000	16,87%
46	Loka POM di Kota Palopo	219.000.000	30.680.000	14,01%
47	Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	9.059.388.000	1.077.430.000	11,89%
48	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	28.927.541.000	2.782.200.960	9,62%
49	Balai POM di Mamuju	6.125.552.000	479.053.775	7,82%
50	Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor Dan Zat Adiktif	7.489.387.000	583.800.620	7,80%
51	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	6.836.889.000	345.300.006	5,05%
52	Deputi IV Bidang Penindakan	12.206.492.000	613.915.978	5,03%
53	Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan	11.507.018.500	459.227.000	3,99%
54	Inspektorat Utama Badan POM	1.010.481.000	0	0,00%
55	Loka POM di Kabupaten Ende	462.720.000	0	0,00%
56	Loka POM di Kabupaten Mimika	612.400.000	0	0,00%
57	Loka POM di Kota Baubau	86.000.000	0	0,00%
58	Loka POM di Kota Dumai	437.030.000	0	0,00%
	Total	616.567.483.500	359.610.530.282	58,32



**BADAN POM**

**KINERJA BPOM**

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2021



Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



Bpom RI